

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menimbulkan dilema yang menantang di semua wilayah, mempengaruhi banyak negara maju dan berkembang. Indonesia, yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang, bergulat dengan kemiskinan sebagai masalah yang signifikan, mewakili tugas yang berat untuk diatasi. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), diperkirakan 26,16 juta orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan per Maret 2022, merupakan 9,54% dari total populasi. Khususnya, Jawa Timur menonjol sebagai wilayah dengan prevalensi individu miskin tertinggi.

Dalam perannya sebagai negara bersatu, Indonesia mengikuti kerangka pemerintahan yang mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah, yang dikenal sebagai konsep desentralisasi dalam pemerintahan. Strategi ini memungkinkan daerah memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mempraktikkan pemerintahan mandiri regional. Tujuan pemberian otonomi ke daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan hasil tata kelola, dengan fokus melayani masyarakat dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang komprehensif. Pembangunan, dipandang sebagai proses perubahan, berupaya meningkatkan kesejahteraan manusia melalui kemajuan dalam standar hidup, perawatan kesehatan, pendidikan, dan keadilan, (Rohim, 2024).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pasal 5 angka 1:

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pemerintah Indonesia membentuk program yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan yang lazim di negara ini. Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) dibentuk, dengan fokus utama pada pengelolaan kemiskinan melalui berbagai program. Program-program tersebut meliputi program Jamkesma, Program Keluarga Harapan (PKH), program Beras untuk keluarga miskin (Raskin), dan Program Bantuan Mahasiswa Miskin (BSM) di bawah Klaster I. Cluster II terdiri dari program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kelompok program Cluster III juga berperan dalam inisiatif ini. penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yang terdiri dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Peraturan Bupati Ponorogo tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multi sector dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 mengatur percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui program terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Fokusnya pada pemenuhan hak dasar warga miskin, pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, serta pemutakhiran data secara berkala. Penanggulangan dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan terkoordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Ponorogo. Dalam rangka menilai dampak Peraturan Daerah terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Wonodadi, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, para peneliti melakukan evaluasi program bantuan sosial terpadu yang

disesuaikan dengan kelompok. Program-program ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dasar, meringankan tantangan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan individu miskin, seperti yang dianalisis di bawah Program pemutakiran Data DTKS.

Bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagai mana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten ponorogo maka perlu dilakukan langkah langkah strategis dan terintegrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan. Meskipun Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2020 telah dirancang sebagai upaya strategis percepatan penanggulangan kemiskinan, implementasinya di tingkat desa, khususnya di Desa Wonodadi menunjukkan beberapa kendala signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui :

1. Tingginya jumlah keluarga miskin yang bertahan

Data menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Desa Wonodadi masih mencapai 628 KK, terdiri dari : Dukuh Krajan 315 KK, Dukuh Tunggon 122 KK dan Dukuh Guwo 191 KK. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah berjalan beberapa tahun, program percepatan penanggulangan kemiskinan belum memberikan dampak yang signifikan secara kuantitatif terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

2. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan tujuan awal

Perbup No. 60 Tahun 2020 menekankan percepatan melalui sinergi program sosial berbasis data (DTKS). Namun, dalam praktiknya sering ditemukan :

- Ketidaksesuaian data DTKS dengan kondisi riil di lapangan, dimana terdapat keluarga miskin yang belum terdata atau justru keluarga yang lebih mampu menerima bantuan
- Distribusi bantuan yang tidak merata dan kurangnya pengawasan atas efektivitas program seperti PKH atau BPNT di tingkat dusun

3. Minimnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi

- Masyarakat tidak banyak yang dilibatkan dalam musyawarah verifikasi data penerima bantuan, sehingga menimbulkan potensi kecemburuan sosial
- Kurangnya sosialisasi mengenai isi Perbup menyebabkan pelaksana teknis di desa belum memahami sepenuhnya arah kebijakan yang digariskan

4. Faktor pendukung dan penghambat yang kurang tertangani

- Kapasitas aparat desa dan kader sosial dalam mengelola data dan mendampingi warga miskin masih terbatas
- Koordinasi antar perangkat desa, dinas sosial, dan lembaga pendukung belum optimal
- Anggaran program yang terbatas menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, skema perlindungan sosial yang komprehensif telah ditegakkan secara konsisten. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mengamankan akses mereka ke layanan dan bantuan penting. Program PKH,

khususnya, didedikasikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kompetensi warga, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Inisiatif ini mengambil peran penting dalam membantu keluarga kurang beruntung di Desa Wonodadi, memungkinkan mereka untuk mendidik anak mereka dan memanfaatkan pemeriksaan kesehatan yang penting.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penulis melakukan kajian secara komprehensif dan metodis, sehingga menghasilkan rumusan judul penelitian "IMPELEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 60 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN PONOROGO "

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Wonodadi?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Wonodadi?

B. Tujuan

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan,

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi efektivitas Peraturan Bupati No 60 tahun 2020 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi factor- factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Wonodadi
3. Untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan terhadap penduduk di Desa Wonodadi

C. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap berhasil jika dapat membantu orang lain baik secara teori maupun praktek. Salah satu hasilnya ditunjukkan di bawah ini:

1) Manfaat Teoritis

memberikan pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan terkait dengan factor-faktor Peraturan Bupati No 60 tahun 2020 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo serta pengetahuan terkait dengan proses peraturan daerah yang dilakukan oleh aparatur desa dan lembaga penanggulangan kemiskinan, serta penulis dapat mempelajari lebih.

2) Manfaat Praktis,

kegunaan dalam keterkaitan penelitian tersebut dengan aspek Pemerintah Desa. Dengan adanya penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat serta memberi masukan bagi pemerintah untuk menindak lanjuti serta mengatasi kemiskinan yang terdapat pada desa Wonodadi.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman konsep yang sedang dibahas dalam penelitian ini, istilah-istilah tertentu akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah fase penting dalam kebijakan publik yang didedikasikan untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Seperti dicatat oleh George C. Edward, ada empat faktor penting yang terlibat dalam tahap ini, yang meliputi komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau perilaku, dan struktur birokrasi (Winarno, 2014).

Menurut Sutaryo (2015), implementasi kebijakan adalah proses penerjemah keputusan atau rancangan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan. Proses ini melibatkan aktor, sumber daya, dan mekanisme koordinasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. (Sutaryo, 2015).

Menurut Dunn (2017), implementasi kebijakan merupakan tahap operasional dari siklus kebijakan yang fokus pada pelaksanaan program atau aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, termasuk mengelola

sumber daya dan mengatasi hambatan agar kebijakan berjalan sesuai rencana. (Dunn, W. 2017).

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan itu intinya adalah bagaimana sebuah keputusan atau rencana yang sudah dibuat bisa dijalankan dengan nyata di lapangan. Proses ini melibatkan banyak orang, sumber daya, dan cara supaya semuanya bisa berjalan lancar sesuai tujuan yang diinginkan.

Secara praktis, implementasi kebijakan seringkali membutuhkan intervensi dari berbagai kepentingan. Proses implementasi kebijakan terdiri dari setidaknya tiga komponen mendasar: tujuan atau metode kebijakan, tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan hasil dari tindakan tersebut. Sederhananya, implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kebijakan.

b) Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan layanan kesehatan. Ini mencerminkan kekurangan pendapatan serta keterbatasan akses terhadap layanan publik dan partisipasi sosial. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kurangnya kesempatan dan pilihan hidup yang layak. (Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011).

Amartya Sen mendefinisikan kemiskinan adalah bentuk kekurangan kebebasan dasar yang membatasi kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Bukan hanya sekedar kekurangan pendapatan,

tetapi juga mencakup keterbatasan dalam akses pendidikan, kesehatan dan partisipasi sosial. Kemiskinan berarti tidak adanya kapabilitas untuk mencapai fungsi- fungsi yang dianggap penting dalam kehidupan. (Sen, A. 1999).

Menurut BPS kemiskinan adalah kondisi di mana tingkat pengeluaran per kapita seseorang berada dibawah garis kemiskinan. Garis ini dihitung berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non- makanan. Individu atau rumah tangga dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi standar konsumsi minimum tersebut. BPS juga menggunakan pendekatan kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. (Badan Pusat Statistik. (2023).

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, baik dari segi pendapatan maupun akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada kekurangan materi, tetapi juga mencakup keterbatasan kebebasan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif. Oleh karena itu, kemiskinan harus dilihat sebagai masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi aspek ekonomi dan sosial secara bersamaan.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin. Kelompok

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. (PP No 15 TAHUN, 2010).

E. Landasan Teori

1. Teori Implementasi

Gagasan implementasi kebijakan mencakup berbagai sudut pandang yang beragam, membuatnya sulit untuk menetapkan batas-batasnya secara meyakinkan. Sebagaimana dibuktikan dalam kamus Webster Wahab (2005), kompleksitas ini menggarisbawahi sifat konsep yang beragam, implementasi dijelaskan sebagai "to provide means for carrying out" (menyediakan untuk melakukan sesuatu); "to give practical effect to" (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Dari definisi ini, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana seperti undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya, dan lain-lain, untuk mencapai dampak atau akibat tertentu.

Menurut Anderson (dalam Islamy, 1996), kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah tertentu, yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku. Sedangkan menurut Menurut Carl Friedrich (wahab, 2008), kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diajukan oleh individu, organisasi, atau badan pemerintah dalam pengaturan tertentu. Ini melibatkan identifikasi tantangan dan

keadaan menguntungkan yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang dinyatakan.

Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk menangani masalah-masalah publik, Langkah-langkah peraturan, termasuk undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan daerah, digunakan untuk menetapkan kerangka kebijakan melewati tahapan yang panjang, dikenal sebagai siklus kebijakan (policy cycle), di mana Implementasi kebijakan adalah fase penting dalam proses siklus tersebut (Muhammad Shindid Muhaimin, 2022).

Implementasi kebijakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kebijakan makro yang diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kebijakan meso atau menengah yang diatur oleh peraturan menteri, gubernur, bupati, dan walikota, serta kebijakan mikro yang mengatur implementasi atau pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional yang lebih detail.

Secara keseluruhan, kebijakan publik merupakan elemen penting dalam struktur negara, yang melibatkan berbagai tingkatan keputusan dan implementasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan:

- 1) Pendekatan Struktural, Pendekatan ini menekankan pentingnya struktur organisasi yang relevan dalam implementasi kebijakan. Struktur ini penting karena implementasi kebijakan seringkali berubah dan tidak selalu berjalan secara linear.

- 2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial, Pendekatan ini fokus pada pengembangan proses dan prosedur yang tepat untuk implementasi kebijakan publik. Ini mencakup perencanaan, penjadwalan, Pengawasan dan pengelolaan kebijakan publik.
- 3) Pendekatan Perilaku, Pendekatan ini melibatkan analisis perilaku dalam mengelola masalah manajemen, yang sering diasosiasikan dengan pengembangan organisasi atau "organizational development".
- 4) Pendekatan Politik menekankan dinamika kekuasaan dan pola pengaruh yang ada dalam birokrasi organisasi. Pendekatan ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan terkait erat dengan dinamika kekuasaan dalam proses kebijakan publik yang lebih luas (Wahab, 2008).

Tujuan utama kebijakan publik pemerintah adalah untuk mengawasi interaksi dalam masyarakat, dalam rangka meningkatkan organisasi, kenyamanan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai tujuan ini, masukan sering kali dikumpulkan dari sektor publik dan swasta oleh pemerintah untuk menyusun artikel ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan tertentu. Proses ini dimaksudkan untuk menjamin ketepatan kebijakan yang dihasilkan dan kontribusinya yang optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selama tahap implementasi kebijakan, beberapa badan atau birokrasi pemerintah mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan melalui mobilisasi sumber daya teknis dan manajerial. Proses ini mencakup serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kapasitas ini, pemerintah mengawasi

pengambilan keputusan, penafsiran, dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka organisasi. Melalui upaya ini, administrator dapat dengan cekatan mengatur sumber daya, badan, dan teknologi yang memfasilitasi implementasi kebijakan..

Model Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III, 1980) Edwards III menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1) Komunikasi

Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada seberapa jelas informasi kebijakan disampaikan kepada masyarakat dan perangkat desa. Dalam kasus ini, sosialisasi melalui pertemuan, media sosial, dan musyawarah desa menjadi kunci utama.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang mencakup anggaran, tenaga kerja, serta infrastruktur yang tersedia memengaruhi keberhasilan implementasi. Jika desa mengalami keterbatasan dana atau kurangnya tenaga pendamping, maka efektivitas kebijakan akan terhambat.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen perangkat desa serta pendamping program dalam menjalankan kebijakan sangat menentukan efektivitasnya. Jika perangkat desa dan pendamping program tidak memiliki pemahaman yang baik atau kurang responsif terhadap kendala yang muncul, maka kebijakan tidak akan berjalan optimal.

4) Struktur Birokrasi

Efektivitas implementasi juga dipengaruhi oleh mekanisme kerja dan prosedur administrasi. Jika prosedur terlalu rumit dan birokrasi terlalu panjang, maka masyarakat akan kesulitan mengakses bantuan dan program tidak akan berjalan sesuai harapan.

2. Impelementasi Kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle (1980) Implementasi dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Grindle memberikan 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik berjalan dengan baik yaitu:

- 1) Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok -Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

- 2) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:
- a. Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
 - b. *Type of benefits* (tipe manfaat) Pada point ini *content of policy* (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
 - d. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan

dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

- e. Program implementer (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. (Fajarwati Arnia,2022).

F. Definisi Operasional



Gambar 1.1

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Meleong (2004), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian ilmiah yang berfokus pada pemahaman fenomena dalam kerangka sosial secara organik, dengan penekanan kuat pada membina komunikasi mendalam antara peneliti dan subjek studi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat utama, terlibat langsung dalam pengumpulan data dari sumber utama. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya tentang peran Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk infrastruktur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada desa wonodadi, Ngrayun, Kabupaten Ponorogo dapat membantu dalam memahami implementasi dari kebijakan ini terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan lokal, dan terutama terkait dengan kemiskinan. Ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan kemiskinan di desa secara lebih efektif dan efisien.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan (*field reseach*)

a. Observasi

Observasi berfungsi sebagai metode agregasi data yang digunakan dalam akuisisi data penelitian melalui pengamatan dan persepsi (Bungin, 2015). Pengamatan melibatkan peneliti yang secara langsung menyaksikan dan memahami fenomena, yang kemudian direkam secara subjektif. Oleh karena itu, penyelidikan ini menggunakan pengamatan terstruktur, yang dirumuskan secara metodis untuk menentukan apa, kapan, dan di mana pengamatan dilakukan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, seseorang dapat memastikan kondisi yang berlaku di wilayah penelitian, khususnya Desa Wonodadi, dan mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Desa memberlakukan kebijakannya. Ini membantu peneliti dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan andal.

b. Wawancara

Wawancara dapat dianggap sebagai sesi tanya jawab yang melibatkan dua atau lebih individu dalam pengaturan tatap muka. Mengenai metodologi wawancara, dapat dinyatakan bahwa wawancara merupakan diskusi yang disengaja yang diadakan antara dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai menanggapi pertanyaan yang disajikan. Wawancara atau dialog dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang kebijakan pembangunan infrastruktur di desa wonodadi, Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk meningkatkan bukti dan data yang dikumpulkan di lapangan dan untuk mendapatkan gambaran umum tentang subjek melalui sarana tertulis. Suatu dokumen dapat didefinisikan sebagai materi tertulis apa pun yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, apakah sengaja disiapkan atau tidak untuk tujuan penelitian (Ghony & Almanshur, 2012). Selain itu, ini berfungsi sebagai kompilasi data atau log catatan ekstensif peneliti, disertai dengan gambar atau foto yang mendukung temuan penelitian. Metode ini melibatkan peninjauan berbagai dokumen resmi, laporan, peraturan, dan arsip di Desa Wonodadi untuk mengidentifikasi komponen yang memiliki potensi untuk memberikan dukungan teoritis untuk data penelitian sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat untuk penelitian dan memastikan validitas dan keandalan temuan. Peneliti juga dapat menggunakan dokumentasi seperti foto atau video selama pekerjaan mereka. Dengan menganalisis dokumentasi, informasi berharga dapat diekstraksi dari sumber seperti surat, buku harian, notulen rapat, kenang-kenangan, log aktivitas, dan catatan lainnya.

4. Teknik Penentuan Informan

Pemanfaatan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode sampling purposive, sebagaimana didefinisikan oleh Sugianto dalam karyanya “Memahami Penelitian Kualitatif.” Menurut Sugiyono, purposive melibatkan pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, salah satu pertimbangan tersebut dapat memilih individu yang

dianggap memiliki pengetahuan terbaik mengenai materi pelajaran, atau individu yang memegang posisi otoritas yang memfasilitasi eksplorasi yang lebih komprehensif dari fenomena sosial atau situasi yang sedang dipelajari (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian khusus ini, informan adalah individu yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai yang paling mampu memberikan informasi yang diperlukan. Informan berfungsi sebagai titik fokus penelitian, menyediakan data yang diperlukan. Sesuai sumber yang digunakan dalam penelitian ini, informan termasuk Kepala Desa (Mujiono), BPD (Adi Kirnawan) Desa wonodadi, dan Masyarakat (Kresno Sunanto).

5. Teknik Analisa Data

Dalam situasi khusus ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yang memerlukan pengaturan sistematis dan pemeriksaan semua data yang telah dikumpulkan. Proses metodologi deskriptif kualitatif melibatkan eksplorasi data yang komprehensif untuk mengungkap pola, tema, dan wawasan bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif data yang dikumpulkan mengenai situasi saat ini (Moleong, 2021). Milles dan Huberman menguraikan fase kunci analisis data kualitatif, yang meliputi pengurangan data, presentasi data, dan menarik kesimpulan (Miles et al., 2014).

1) Pengumpulan Data

Memproses dan mempersiapkan data untuk analisis adalah langkah penting dalam metodologi penelitian di berbagai disiplin ilmu. Proses multifaset ini mencakup berbagai tugas, termasuk menyalin wawancara, memindai materi, mengetik data lapangan, dan menyortir dan mengatur

data ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan sumber informasi. Masing-masing kegiatan ini membutuhkan perhatian yang cermat terhadap detail dan kepatuhan terhadap protokol yang ditetapkan untuk memastikan integritas dan keandalan data yang dianalisis. Selain itu, penanganan data yang cermat selama tahap pemrosesan dan persiapan sangat penting untuk memfasilitasi wawasan yang akurat dan bermakna untuk diturunkan selama fase analisis berikutnya.

2) Reduksi data

Pengurangan data, suatu proses analisis, bertujuan untuk mengkategorikan, memandu, menghilangkan elemen berlebihan, dan menyusun data yang telah mengalami pengurangan untuk menawarkan representasi yang lebih jelas dari hasil pengamatan dalam kerangka kerja tertentu. Metode ini melibatkan perampingan informasi dengan menyaring detail yang tidak relevan dan mengatur data yang tersisa dengan cara yang lebih koheren untuk peningkatan pemahaman.

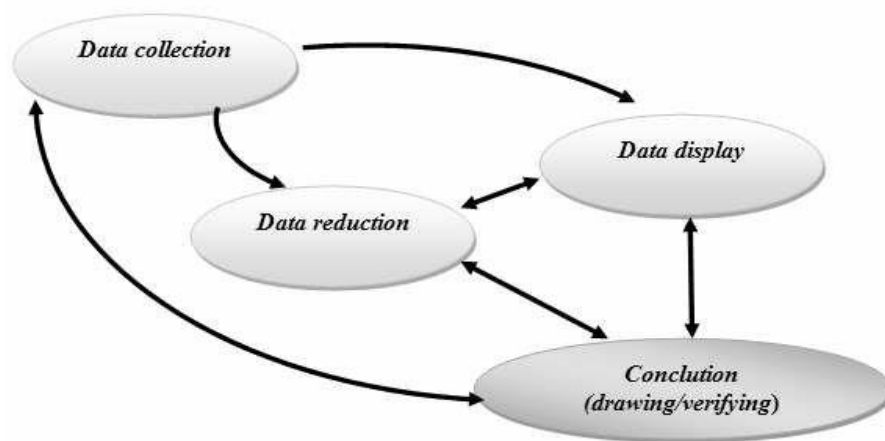
3) Penyajian Data

Representasi data melibatkan pemeriksaan dan pengorganisasian data dalam berbagai format seperti matriks, jaringan, bagan, atau grafik, yang merupakan alat penting untuk menganalisis dan menafsirkan informasi. Representasi visual ini membantu dalam memahami kumpulan data yang kompleks dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak jelas dari data mentah saja. Dalam penelitian kualitatif, data sering disajikan melalui deskripsi ringkas, tabel, dan penggambaran

visual yang menunjukkan hubungan antara kategori yang berbeda, memberikan gambaran komprehensif tentang temuan.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan mewujudkan tindakan menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi validitasnya melalui proses verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan dianggap sebagai tentatif dan dapat dimodifikasi tanpa adanya bukti kuat yang mendukung fase pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dicapai berfungsi untuk menjawab pertanyaan mendasar yang awalnya dirumuskan. Kesimpulan ini memainkan peran penting dalam membentuk arah studi penelitian dan menentukan hasilnya.



Gambar 1.2 Teknik Analisis Data

Sumber: Miles, M. B., Huberman, (2014)

Keterangan Gambar:

- 1) Pengumpulan data adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data.

- 2) Penyajian data melibatkan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan pengamatan mengenai tindakan.
- 3) Pengurangan Data adalah proses yang melibatkan pemilihan dan fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti catatan tertulis di lapangan. Ini mencakup pengumpulan data, presentasi, pengurangan, penarikan, dan kesimpulan.
- 4) Kesimpulan Menggambar adalah proses mengidentifikasi makna, mendokumentasikan keteraturan, pola, dan penjelasan yang dapat ditafsirkan atau disimpulkan.

